IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Prgram Studi Administrasi Publik

OLEH

INDAH FEBRIYANTI

NPM: 2023343

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama	: Indah Febriyanti
NPM	: 2023343
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu Sungai utara

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 14 November 2026

Mengetahui,
Ketua Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Yusran Fahmi, S.IP, M.A.P
NUPTK. 6146742643130113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal yang berjudul "**IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**" dalam proses penyusunan proposal penelitian ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberi data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQaR., CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrsi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Yusran Fahmi, S.IP, M.A.P Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak Jamil Rifani, S.Sos, M.M. selaku Dosen penguji yang memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Tony Fitriady, S.STP,M.Si Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpatisipasi memberikan

informasi serta data-data yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
7. Kepada mama tercinta dan saudara kandung yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan proposal skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORITIS **8**
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Tinjauan Teoritis 11
C. Kerangka Pemikiran 24
BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Lokasi Penelitian 26
B. Pendekatan Penelitian 29
C. Tipe Penelitian 30
D. Data dan Sumber Data 30
E. Desain Operasional Penelitian 32
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Analisis Data 36
H. Uji Kredibilitas Data 38
DAFTAR PUSTAKA **41**

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Daftar Karyawan/Karyawati pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Data Informan 32

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian 34

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 25

Gambar 2.2 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....**Error! Bookmark not defined.**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Perda No 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perda ini pada dasarnya menjadi dasar daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan khususnya pada Pasal 28 Ayat 1, Setiap kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksaan setempat paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran, untuk dilakukan penatatan dalam registasi Akta Kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan berkaitan dengan pencatatan berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan sebagai bukti identitas dan status hukum seseorang. Penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas dalam

memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup berbagai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, salah satunya adalah penerbitan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan karena menjadi bukti resmi mengenai peristiwa kelahiran seseorang. Kepemilikan akta kelahiran sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya bagi anak, karena dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi seperti pendaftaran sekolah, memperoleh pelayanan kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan lainnya, serta berbagai pelayanan publik yang membutuhkan bukti identitas dan status seseorang. Oleh karena itu, pelayanan penerbitan akta kelahiran perlu dilaksanakan dengan baik agar setiap masyarakat dapat memperoleh haknya atas dokumen kependudukan.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat dasar hukum daerah yang mengatur pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan daerah tersebut ditetapkan sebagai upaya penataan dan penertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2015 menjadi salah satu landasan penting dalam melihat bagaimana administrasi kependudukan diselenggarakan di daerah. Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan

pencatatan sipil mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran. Dengan adanya ketentuan daerah tersebut, pelayanan penerbitan akta kelahiran seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku, mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan persyaratan, pencatatan peristiwa kelahiran, pengolahan data, sampai dengan penerbitan dokumen kepada masyarakat. Keberadaan peraturan daerah tidak secara otomatis menjamin bahwa pelaksanaan pelayanan di lapangan telah berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, implementasi suatu kebijakan atau peraturan sangat bergantung pada bagaimana aparatur melaksanakan ketentuan tersebut dan bagaimana masyarakat memperoleh serta mengikuti pelayanan yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk melihat kesesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran yang diterima masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pelayanan, kelengkapan dokumen yang diajukan, proses pemeriksaan dan verifikasi data, penyampaian informasi oleh petugas, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung proses pelayanan. Apabila masyarakat belum memahami persyaratan dengan baik atau terdapat dokumen yang belum lengkap, maka proses pelayanan dapat mengalami hambatan karena masyarakat harus melengkapi atau memperbaiki dokumen yang diperlukan. Selain itu, pelaksanaan

pelayanan juga tidak terlepas dari kemampuan aparatur dalam memberikan informasi dan membantu masyarakat selama proses pengurusan akta kelahiran. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, tahapan pelayanan, serta waktu penyelesaian dokumen. Kejelasan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengurus akta kelahiran. Dengan demikian, implementasi pelayanan tidak hanya dilihat dari diterbitkannya dokumen akta kelahiran, tetapi juga dari bagaimana proses pelayanan tersebut dilaksanakan oleh aparatur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Adapun fenomena yang dapat diamati adalah:

1. Masih banyak nya masyarakat yang menunda pembuatan akta kelahiran.
2. Antrian panjang di loket pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Masih banyak masyarakat yang belom paham prosuder dalam pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan observasi dan masalah di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dan mengambil judul Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara. Untuk

menganalisis implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi George.C.Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara berdasarkan peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara No 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara No 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan?
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat menghambat Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam kajian keilmuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pelayanan publik dan pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi pelayanan publik, khususnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi seperti akta kelahiran.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya meningkatkan implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran, termasuk dalam mengatasi kendala teknis, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

hulu sungai utara. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai salah satu dokumen aministrasi kependudukan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta menambah pengalaman dan wawasan mengenai pelayanan penerbitan akta kelahiran.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

1. Sofia Dewi Rosita 2020, Universitas Islam Malang Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Nrgara Malang dalam penelitian "**Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus: Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)**" pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang teknologi, kurang sosialisasi dari pemerintah tentang pembuatan akta kelahiran online, mereka bingung ingin bertanya kemana, sedangkan sistem online bersifat pasif, sehingga inovasi pelayanan pencatatan akta kelahiran berbasis online di kota malang, tidak berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat banyaknya masyarakat yang masih membuat akta secara manual. Yang dirasa lebih mudah daripada membuat akta kelahiran online.

   Rumusan Masalah:

   1. Bagaimana kualitas pelayanan implementasi kebijakan akta kelahiran berbasis online di Kota Malang?
   2. Apa saja kendala-kendala dari implementasi kebijakan akta kelahiran berbasis online di Kota Malang?

3. Apa saja solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dari implementasi kebijakan akta kelahiran berbasis online di Kota Malang?

2. Nidya Alvina.K Dra, Dyah Lituh ayu, M.S 2017 Depertemen administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro dalam penelitian "**Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Semarang**" pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penulis menemukan adanya permasalahan yaitu sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan, sosialisasi yng dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang masih belum maksimal akibat adanya miss komunikasi antar implementor sehingga maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tidak tercapai, masih ditemukannya praktek-praktek kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan salah satu contohnya pungutan liar (pungli), serta masih maraknya stereotype serta penilaian negative dikalangan masyarakat mengenai kinerja pemerintah di Indonesia, dan kurangnya jumlah Sember Daya Manusia (SDM) di bidang pencatatan akta kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Rumusan Masalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akta kematian di kota semarang agar mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat langsung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan kualitas komunikasi antar implementor agar tidak terjadi miss komunikasi.
3. Melakukan tinjauan langsung oleh pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kota semarang bagian pencatatan akta kematian untuk melihat progress yang terjadi di lapangan untuk melihat apakah implementasi yang dijalankan sudah sesuai dengan prosuder pelaksanaan.
4. Bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib dalam rangka mengentaskan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah agar terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan Indonesia.
5. Menigkatkan keikutsertaan Lembaga-lembaga strategis seperti kelompok-kelompok masyarakat dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya sosialisasi program pencatatan akta kematian.
6. Meningkatkan kualitas fasilitas fisik yang sudah tersedia dan menambah jumlah unit bis/mobil keliling agar masyarakat dapat lebih nyaman dan tertarik untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa inggris, yaitu public policy. Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan"dan ada juga menerjemahkan menjadi kebijaksanaan. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa policy diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan". Oleh karena itu public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik dalam Sahya Anggara (2024:35)

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus di buat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Sahya Anggara, 2024:35), "public policy is whatever the government choose to do or not to do" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintahan memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "Tindakan"

pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992:2-4) dalam (Sahya Anggara, 2024:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukandan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson (1970) dalam (Sahya Anggara 2024:35), Menyatakan bahwa, "public policies are thoes developed by governmental bodies an officials" (kebijakan publik adalah kebijakan yang di kembangkan oleh Badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton dalam (Sahya Anggara, 2024:35), "public policy is the outhoritative allocation of values for the whole society" (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) dalam (Sahya Anggara, 2024:37) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau Tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu jangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Said Zainal Abidin (2014:23) dalam (Sahya Anggara,2024:37), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan kusus di bawahnya.

b. Prinsip-prinsip Petunjuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan keperintahan menurut Nugroho (2004:100-105) dalam (Sahya Anggara, 2024:39), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:

1. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan)
2. Cara kebijakan publik diimplementasikan
3. Cara kebijakan publik dievaluasi

c. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin (2004:56-59) dalam buku (Sahya Anggara, 2024:40), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkai kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.

1. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

3. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
4. Adil
5. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

d. Tingkatan Kebijakan

Secara umum, menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) dalam (Sahya Anggara, 2024:40), kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang besifat positif maupun yang bersifat negative, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

e. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Aderson (1970) dalam (Sahya Anggara, 2024:55-56) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut.

1. Substantive and Procedural Policies

   Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah misalnya kebijakan Pendidikan,kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

   Procedural policy adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan (policy stakeholders). Misalnya undang-undang tentang Pendidikan nasional, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendudkan Nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/ organisasi lain yang terlibat, bagi instansi/ organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah yaitu DPR depertemen kehakiman Depertemen Tenaga Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, dan presiden yang mengesahkan undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut policy strakeholders.

2. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies

   Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/ keuntungan kepada individu, kolompok, atau perushaan.

   Redistributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindaian alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.

   Regulatory policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelanggaran terhadap perbuatan/ tindakan.

3. Material policy

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber sumber material yang nyata bagi penerimanya

4. public Goods and Private Goods policies

Public good plicy adalah kebijakan yang mengatur tentang peenyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.

Private good policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perorangan) dipasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

2. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanan sesuatu dan “to partical effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi adalah sebagai

pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuanyang telah diterapkkan”. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi “Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti. (Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. SI, 2022, 36-37)

Konsep implementasi berasal dari Bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat teradap sesuatu). (Sahya Anggara,2024:232).

Howlett & Ramesh (1995) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “The process whereby programs or policiesare carried out; it denoted the translation of plans into practice.” Dimana definisi keduanya ini sejalan dengan tulisan Barrett (2004) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai, “translating policy into action” atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam Tindakan. Jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamatkan oleh kebijakan itu sediri. (Leo Agustino, 2022:145)

Menurut Daniel Maznian dan paul Sabatier dalam buku (Leo Agustino, 2022:146)

“Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

3. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu proes keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, pembentukan budaya perusahaan secara internal. Maupun melakukan komunikasi terhadap pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan. Penekanan terhadap definisi pelayanan tersebut ialah pelayanan yang diberikan bersangkutan segala usaha yang telah dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebuthan (Mustanir, Dema, et al., 2018) (Mustahir, Madaling, et al., 2019).

Brata juga menambahkan pendapatnya bahwa suatu layanan dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan seseorang seperti hal orang-orang yang memberikan layanan kepada orang-orang yang berada disekitar yang membutuhkan informasi organisasi tersebut.

Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi pelaggannya, sehingga pelnggan dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaanya oleh pihak perusahaan. Dalam buku nya yang bertajuk hubungan masyarakat membina hubungan baik dengan publik (Mustanir & Yasin,2018)

4. Teori Implementasi

1. Teori George C. Edwards III

Menurut George C. Edward III dalam (Reno Affrian, 2023:38) mengidentifikasi keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

a) Komunikasi

Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan *(policy maker)* kepada pelaksana kebijakan *(policy implementors)*. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam deminsi, antara lain dimensi penyampaian informasi *(transmission),* kejelasan *(clarity),* dan konsisten *(consistency).*

b) Sumber Daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber terdiri dari tiga, yaitu, manusia *(staff),* peralatan *(facilities),* serta informasi dan kewenangan *(information and authority)*

c) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksanaan, Disposisi terdiri dari pengangkat birokrasi *(stffing the bureaucracy)* dan insentif *(incentives).*

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procuderus* (SOP). Struktur birokrasi terdiri dari SOP *(standard operating prcedures)* dan *fragmentation.*

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat berkaitan dengan kemauan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat menjadi salah satu alas an masyarakat menunda pengurusan akta kelahiran.

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat berkaitan dengan pengetahuan mengenai persyaratan dokumen, prosuder pengajuan, dan tahapan penerbitan akta kelahiran. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan masyarakat kesulitan mengurus dokumen atau harus Kembali melengkapi persyaratan.

3. Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Dokumen yang belum lengkap atau ketidak sesuaian data kependudukan dapat menghambat proses pengajuan akta kelahiran. Faktor ini perlu diteliti untuk mengetahui apakah kendala berasal dari persyaratan permohonan atau proses pelayanan di kantor

6. Akta Kelahiran

a. Definisi Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas bermaterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama saksi, dan nama orang tua kandung serta tanda tangan pejabat yang berwenang di atas materai. Akta kelahiran ini merupakan salah satu dokumen resmi negara, sebagai bukti keabsahan status hubungan hukum seorang anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan akta kelahiran yang dimiliki seorang anak dapat mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sah menurut hukum. Hal ini sangat penting bagi orang tua kandungnya untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena disamping menyangkut identitas dari anak dan status kewarganegaraan juga akta kelahiran berperan aktif dalam menentukan kedepannya nasib si anak dikemudian hari, misalnya kegunaan akta kelahiran sangat dibutuhkan:

1. Sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah bagi si anak dari TK-SD dan seterusnya yang akhirnya sebagai rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah
2. Salah satu syarat pembuatan kartu keliarga (KK), dan kartu tanda pengenal (KTP) serta kemungkinan besar dibutuhkan untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

3. Pengurus hak waris
4. Melaksanakan perkawinan, pembuatan paspor, pembuatan SIM, dan lain-lain

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu haka tau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dapat di golongkan dalam pengertian akta, suatu surat yang harus ditandatangani.

Yang dimaksud dengan penandanganan ialah membubuhkan nama dari si penandatanganan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Dalam bidang perdata, setiap perjanjian seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, asuransi, penghibahan, perkawinan, kelahiran, pengangkat anak, bahwa kematianpun sengaja dicatat atau dituliskan dalam bentuk akta. Hal ini dilakukan agar apabila suatu Ketika terjadi sengketa yang timbul atas peristiwa tersebut, akta dijadikan alat bukti terkait transaksi tau peristiwa hukum yang terjadi.

Akta kelahiran adalah berupa catatan dokumen penting yang berupa sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Setiap anak yang lahir harus di data kedalam catatan kependudukan, sebagai symbol identitas warga negara. Selain dari itu, akta kelahiran banyak memiliki fungsi yaitu sebagai identitas anak, untuk mengurus pendaftaran kperluan sekolah, syarat melamar kerja,

untuk mengurus hak waris, untuk mengurus paspor dan terlebih sebagai data negara status populasi atau jumlah warga negaranya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara.

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan teori Implementasi Geogre C.Edward III, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

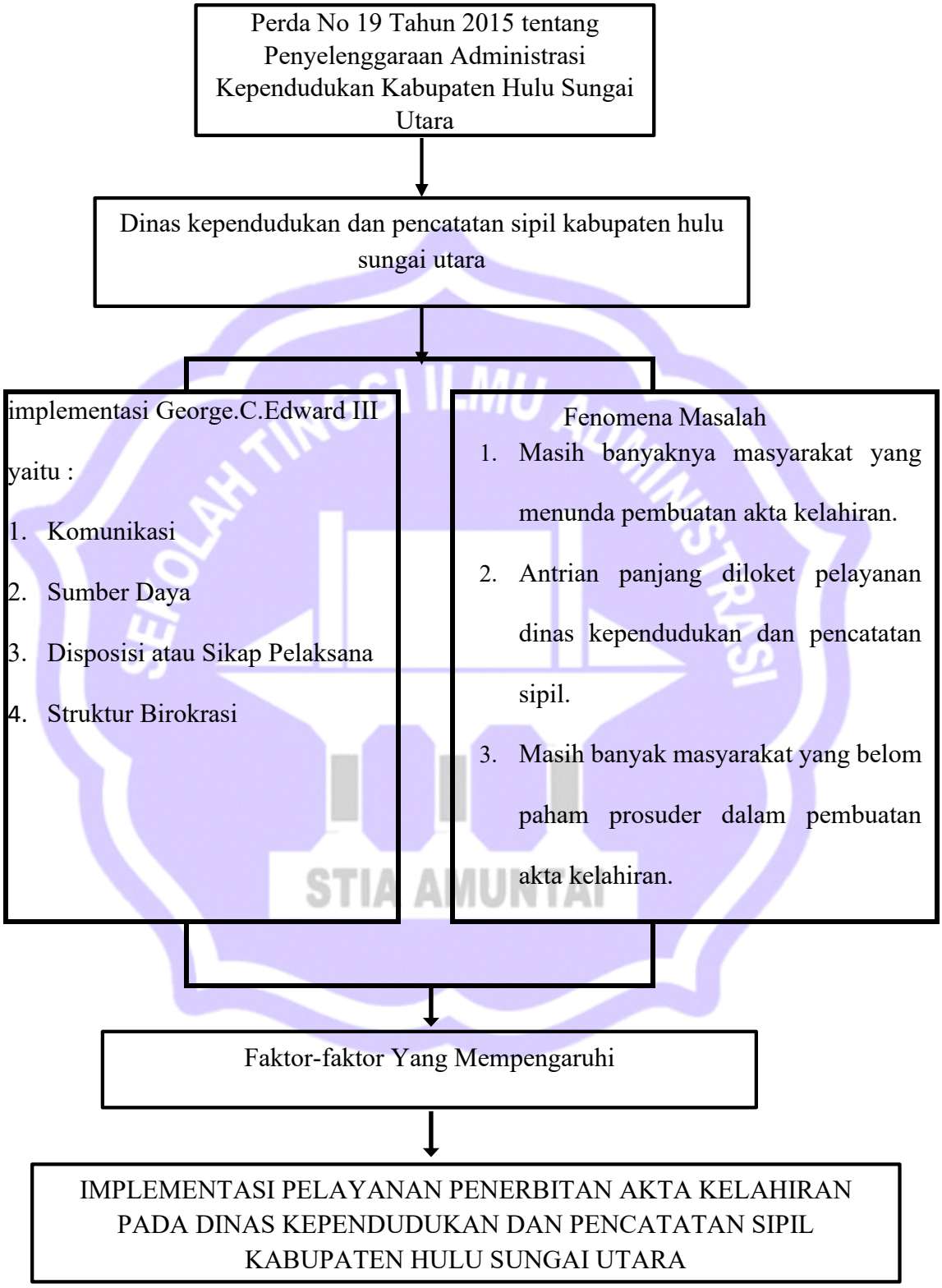

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Disdukcapil HSU) yang beralamat di JL. Karya Manuntung, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2.2
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 2.3
Struktur Organisasi

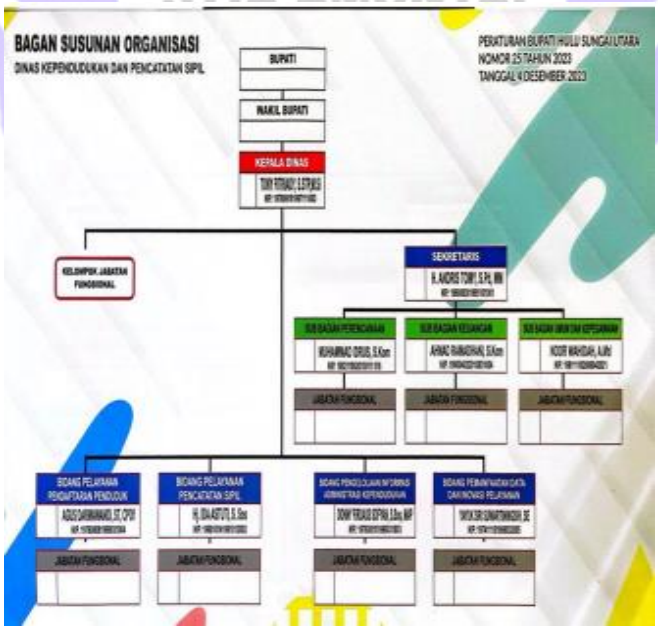

Table 3.1
Daftar Karyawan/Karyawati pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1	Tony Fitriady, S.TP, M.Si	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IVc) 1 November 2022
2	H. Andris Tomy, S.Pd, MM	Sekretaris	Pembina Tk. 1 (IV/b)/ 1 Oktober 2024
3	Agus Darmaawandi, ST, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pembina (IV/a) /1 April 2024
4	Hj. Ida Astuti, S.Sos	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Pembina (IV/a) /1 April 2024
5	Donny firdaus Sofyan, S.Sos, M.AP	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembina (IV/a) /1 April 2024
6	Yayuk Sri Suwartiningsih, SE	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Pembina (IV/a) / 1 Juni 2025
7	Muhammad Idrus, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2022
8	Noor Wahidah, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c) /1 Oktober 2022
9	Ahmad Ramadhani, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata (III/c) /1 April 2023
10	Muhammad Fazeriansyah, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2022
11	Rezki Yunira, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata (III/c) / 1 April 2026
12	Melisa Anggraini, S.sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Maret 2026
13	Akhmad Agus Maulidi, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penata Muda (III/a) / 1 Mei 2025
14	Imaniar Fitriani, A.Md. Keb	Pengolahan Data dan Informasi	Pengatur Tk. (II/d) / 1 Oktober 2023
15	Pahrudi	Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional
16	Sri Rahma Agustina, S. Kom	Administator Database Kependudukan Ahli Pertama	PPPK / 1 April 2024 – 31 maret 2029
17	Muhammad Nufi Aminuddin, S.sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
18	Jannahtun Elsa, S.AP	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
19	Hendra Tisya, SE	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
20	Umniyati, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
21	Syarif Hidayatullah, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
22	Hendra Jumaidi, S.sos M	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
23	Trimuna Liasya, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
24	Ida Mahrita, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
25	Maya Astuti, S.HI	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari
26	Muhammad Husaini, S.SOS	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
27	Dewi Purnama Sari, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
28	Fitriani, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
29	Normiati, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
30	Akhmad Fauzan Yasni, A.Ma	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Maret 2025 – 28 Februari 2030
31	Maulisa, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025-30 September 2030
32	Supiani, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025-30 September 2030
33	Munawarah, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September 2030
34	Muhammad Hardianor, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September 2030
35	Elka Saputra, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September 2030
36	Pahmi, S.Sos	Penata Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September
37	Muhammad Riza Kurniawan, S.Sos	Operator Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September 2030

38	Slamet Prasetyo	Operator Layanan Operasional	PPPK / 1 Oktober 2025– 30 September 2030

B. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memahami kondisi yang terjadi dilapangan berdasarkan fakta, pengalaman, pendapat, serta informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan penerbitan akta kelahiran. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengetahui bagaimana implementasi layanan tersebut dilaksanakan serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran. Penelitian tidak hanya melihat hasil dari pelaksanaan layanan, mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksanaan, sampai dengan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan layanan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang etnographi budaya, di sebut

sebagai metode kualitatif, karena ada yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono 2019, 17-18)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat *postpositivisme,*digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* pada *generalisasi.* (Sugiyono 2019, 17-18)

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitan deskriptif kualitatif. Dalam mengulas, mengembangkan, dan menguji untuk menentukan suatu pengetahuan dengan cara ilmiah yang dapat dipakai metodologi penelitian ada beberapa metode yang dapat digunakan tentunya metode yang akan dipilih harus sesuai dan berhubungan dengan prosuder Implementasi pelayanan penerbitan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai utara.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta,dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data data utama (*primer*), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya, hanya dengan didapatkannya data tersebut

sebuah penelitian dapat dkatakan berhasil dikerjakan. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang disebut dengan data utama (*primer*). Bungin (2013:128) mendefinisikan data primer sebagai data yang di ambil dari sumber primer atau sumber pertama dilpangan. (Ibrahim,2015)

2. Data Sekunder

Data skunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi, bahkan data skunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau diteliti. Sebagai data pendukung (skunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian. (Ibrahim,2015)

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Jadi didalam penelitian ini sumber data yang utama adalah informan (manusia), yang di tentukan dengan teknik purposive sampling sehingga terdapat informan kunci. (Sugiyono, 2017). Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objeck/situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3.2

Data Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1
3	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1
4	Penata Layanan Operasional	2
5	Masyarakat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran	4

Sumber: Hasil Penulis, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah/mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan operasional penelitian adalah memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotensi yang akan menjadi sebuah penelitian Desain operasional digunakan untuk mengukur suatu variable.

Teori yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi Implementasi menurut teori George C.Edwards III (Leo Agustino,2022,154-158) dalam Implementasi kebijakan dipengatuhi oleh empat variable,yakni :

1. Komunikasi

   Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

   Merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan, Dimensi sumber daya terdiri dari empat yaitu, staf,informasi,kewenangan,fasilitas.

3. Disposisi

   Adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebjakan tidak hanya harus mengetahui apa yang kan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanakan atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak orang, Ketika struktur birokrasi tidak kondutif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel Penelitian	Sub Variabel	indikator
Implementasi menurut Geogre C.Edward III, yaitu (1980,38-40)	Komunikasi	a. Penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsisten informasi
	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Fasilitas c. Informasi d. Kewenangan
	Disposisi	a. Sikap pelaksanaan b. Komitmen c. kejujuran
	Birokrasi	a. SOP b. Pembagian tugas c. koordinasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Didalam metode penelitian kualitatif ada beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumen (Leo Agustino,2022)

1. Observasi atau pengamatan adalah upaya mengamati objek yang diteliti termasuk lingkungan, tindakan, dan peristiwa yang melingkupi objek yang diamati. Metode ini biasanya didasarkan atas sensibilitas etnografi peneliti. Makanya, peneliti sungguh-sungguh berniat untuk memahami sikap, tindakan, perilaku, dan fakto-faktor sebanyak mungkin dari dalam kehidupan mereka sendiri sekaligus menciptakan-makna situasi. Secara etnometologi, observasi berusaha untuk memahami "tata-aturan" umum sehari-hari yang Sebagian besar tidak terungkap, namun secara diam diam mereka ketahui.
2. Wawancara adalah Teknik lain dalam rangka memperleh data dari sumeber data. Wawancar dapat dilakukan dengan tatap muka langsung, melalui e-mail, atau telpon dan bersipat informal maupun formal. Wawancara dibagi kedalam dua bentuk: (i) wawancara tidak-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (guidance interview) ataupun (ii) wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan/jawaban tetutup (data berupa angket maupun kousioner). Wawancara tidak terstruktur kadang-kadang direkam dan kemudian dengan hati-hati dibuat transkipsi nya.
3. Dokumen dan literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dokumen serta literatur dari berbagai jenis sumber-tanggung

jawab pada topik penelitian, bisa berupa hasil penelitian (skripsi, tesis, atau disertasi), jurnal, buku atau laporan. Bukan hanya itu dokumen dan literatur dapat juga berupa catatan legislative, rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, konsep-konsep kebijakan yang sudah di revisi, notulen atau catatan rapat/pertemuan,laporan tahunan, korespondensi, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo dalam (V. Wiratna Sujarweni, 2020: 33) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus dan masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas, data kualitatif yang biasanya dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak ada berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Redukasi Data

   Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-

hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

   Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

   Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

   Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kebijakan, (2017,252) uji kredibilita data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kulalitatif antara lain dilakukan dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian,triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member chek* (Sugiyono,2017)

1. Perpanjang pengamatan

   Perpanjang pengamatan berarti penelitian Kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin berbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang di sembunyikan lagi. Bila telah berbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketentuan

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang di amati.

3. Triangulasi

   Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

   Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

   Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, alat rekam suara dangat diperlakukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah

ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang di maksud sumber data atau informan.

STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Internet:

Anonim 2023, Pentingnya akta kelahiran sebagai identitas anak yang dilahirkan tersedia: https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/3778/3907

Sofia Dewi Rosita. (2020). *Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*. Universitas Islam Malang https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1116

Nidya Alvina.K Dra, dan Dyah Lituhayu, M.S. (2017). *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/16539/15932

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Leo Agustino (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*

Thamas R. Dye (2024). (Sahya Anggara) *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.*

James E.Anderson (2024). (Sahya Anggara) *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.*

David Easton (2024). (Sahya Anggara) *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia*

Aminullah (2024). (Sahya Anggara) *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.*

Said Zainal Abidin (2024). *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia*

Van Meter dan Van Horn (2024). *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia*

Mustahir, Madaling, et al., (2019). *Pelayanan Publik. Pasuruan: Jawa Barat*

Affrian, Reno. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.*

Sahya Anggara. (2024). *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.*

Sujarweni,V.W.(2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press.*

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.*